

Masyarakat Sipil Global: Pengertian dan Prospek

JALAL

Abstract

The Green Revolution has proven deteriorating to Indonesian agriculture and farmers. The deterioration will continue in globalization era, and even worsening. Both AOA and TRIPs as market tools under WTO regime will act as, borrowing Anthony Giddens' terminology, the runaway juggernaut to crush Indonesian farmers and community at large, whether or not they resist it. But there maybe a power to make this market globalization juggernaut slow down, namely global civil society. Different from first and second sector globalization, this third sector globalization seems to be more benign to local people from developing countries. The result is a civil society with following characteristics: exists in one sense when civic associations concern themselves with issues that transcend territorial geography, the use of supraterritorial modes of communication, their campaigns adopt a transborder organisation, and motivated by sentiments of transworld solidarity. With these characteristics, a global civil society can contribute to global well being by: (1) securing material welfare, (2) being an important conduit of civic education, (3) giving voices to important issues, (4) fueling debates, (5) increasing transparency and accountability, (6) promoting or suspending legitimation, and (7) enhancing social cohesion. We may hope for these great potent but must not forget four ways within global civil society that may cause actual damage. Following Jan Scholte, they are, first, elements of 'uncivil society' can be ill intentioned; second, flawed policy; third, undemocratic practices; and last, inadequate representation. By combining the seven potent and avoiding the four damages, we may achieve better future through global civil society.

KASUS PERTANIAN INDONESIA: SUATU PENGANTAR KE GERAKAN MASYARAKAT SIPIL GLOBAL

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa nasib pertanian Indonesia dikhawatirkan menjadi makin buruk di era globalisasi. Pemburuan yang demikian sesungguhnya mulai terjadi semenjak Indonesia memasuki babak baru modernisasi pertanian melalui Revolusi Hijau. Dengan Revolusi Hijau para petani harus membiayai sendiri semua masukan produksi kecuali tenaga kerja mereka. Masukan berupa bibit unggul, pupuk kimia, pestisida harus dibeli dari

toko-toko yang merupakan outlet perusahaan multinasional.¹ Walaupun petani 'bebas' menanam apa saja, namun hingga tingkat kecamatan jenis dan jumlah bibit dan benih yang beredar diatur oleh pemerintah. Hingga tingkat desa, 'kepatuhan' para petani diawasi oleh aparat pemerintahan sipil maupun aparat militer.

Lalu, apa hasil dari proses yang penuh paksaan itu? Mungkin hanya satu yang 'membanggakan', yaitu bahwa pada tahun 1985 Indonesia tidak lagi mengimpor beras hingga tahun 1988. Selebihnya, hal-hal buruklah yang bisa dicatat. Francis Wahono²

mencatat bahwa seluruh pakar, kecuali beberapa yang berasal dari Australia, yang meneliti mengenai Revolusi Hijau sepakat mengenai dampak negatif Revolusi Hijau. Revolusi Hijau telah membagi masyarakat desa menjadi dua kelas: mereka yang disingkirkan dan diuntungkan olehnya. Mereka yang diuntungkan adalah para petani berlahan luas yang jumlahnya sangat kecil dibandingkan petani tunakisma dan buruh tani yang mengalami penyingkiran. Kalau para pakar Australia merelatifkan dampak negatif dari Revolusi Hijau dengan menyatakan bahwa para petani yang tersingkir telah memperoleh pekerjaan di kota, tampaknya mereka melupakan bahwa jenis pekerjaan di kota yang diperoleh para petani miskin adalah jenis pekerjaan informal yang tidak menentu. Belum lagi dampak buruk terhadap lingkungan berupa meningkatnya gulma, resistensi hama dan dampak pestisida bagi kesehatan masyarakat. Apakah dampak itu setara dengan peningkatan produksi? Daly dan Cobb³ dengan pasti menjawab tidak, karena ternyata satu-satunya ukuran peningkatan produksi akibat Revolusi Hijau adalah apabila dibandingkan dengan masukan tenaga kerja saja atau produktivitas tiap petani. Apabila produksi itu dibandingkan dengan satuan energi atau masukan modal, maka pertanian non-Revolusi Hijau lebih unggul.

Bagaimanakah kelanjutan pertanian Indonesia mendatang? Tampaknya semenjak Januari 1995 masalah itu sudah dapat dengan jelas diramalkan. Januari 1995 adalah waktu di mana WTO secara resmi menggantikan fungsi GATT dengan sedikit mengalami perubahan fungsi. Apabila GATT lebih banyak berkutat dalam hal penurunan tarif, WTO lebih bertindak sebagai wasit bagi lalu lintas perdagangan internasional selain menciptakan berbagai aturan main perdagangan. Aturan yang dikeluarkan WTO pun mengikat secara hukum

sehingga anggota yang melanggar bisa dikenai sanksi.⁴ Dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh WTO tersebut terdapat dua bagian yang dapat digunakan untuk meramalkan masa depan pertanian Indonesia, yaitu bagian *Agreement on Agriculture* atau AOA dan *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* atau TRIPs.

AOA berisikan kebijakan penurunan tarif, penurunan subsidi terhadap produk pertanian, pengurangan subsidi ekspor dan peraturan-peraturan sanitari. Masalah penurunan tarif dan subsidi dinyatakan sebagai persentase terhadap tingkatan sebelumnya secara bertahap. Di sinilah masalah dimulai. Negara-negara maju sesungguhnya memberi subsidi yang jauh lebih besar pada sektor pertanian dibandingkan negara-negara berkembang. Penurunan bertahap sebagai persentase terhadap tingkat sebelumnya tentu saja akan berdampak buruk kepada negara-negara berkembang yang subsidinya memang tidak seberapa itu. Dapat diduga bahwa aliran produk pertanian yang lebih deras akan terjadi dari negara maju ke negara berkembang. Penurunan subsidi terhadap industri gula Indonesia serta penghilangan tarif impornya menunjukkan dengan jelas gejala ini. Bagaimana mungkin industri gula Indonesia dapat bersaing dengan eksportir gula Uni Eropa yang masih disubsidi 240% serta eksportir Amerika Serikat dengan subsidi 155%? Sementara aturan sanitasi juga telah menelan korban ditolaknya ekspor produk perkebunan dan perikanan Indonesia di EU, AS dan Jepang. Selama tahun 1999 saja produk pertanian Indonesia telah ditolak 23 kali. Pemberlakuan *Hazard Analysis Critical Control Point* sejak 1997 tampaknya digunakan oleh negara-negara maju untuk membendung serbuan produk pertanian negara berkembang dengan alasan 'tidak bermutu' dan 'tidak sehat' secara sepihak.⁵ Supaya lolos, maka negara-negara maju tu-

juan ekspor memberikan jasa konsultasi, penyediaan alat, sertifikat layak uji yang hanya berlaku bagi negara bersangkutan. Hal ini tentu saja berdampak pada membengkaknya biaya dan turunya daya saing produk pertanian negara berkembang, sementara negara maju bisa menambah keuntungan yang telah dinikmatinya.

Dalam TRIPs, terdapat juga jebakan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kesimpulan dalam butir TRIPs menyatakan bahwa dengan hak paten atas makhluk hidup, seseorang atau suatu lembaga memiliki hak sepenuhnya untuk memanfaatkan dan menjual jenis atau varietas tersebut dan bila orang lain ingin memanfaatkan ataupun menjual jenis atau varietas yang sama mereka harus membayar kepada pemilik paten. Hal ini sungguh ironis bagi Indonesia yang merupakan negara kedua penyedia plasma nutfah terbesar, termasuk tanaman pangan, namun sangat sedikit memegang paten. Sebagian besar paten dipegang oleh perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara maju yang sesungguhnya bukan tempat asal plasma nutfah itu.⁶ Permasalahan utamanya terletak sejak awal: paten hanya dapat diberikan pada individu atau perusahaan, sehingga para petani Indonesia yang kebanyakan masih bersifat komunal dalam penggunaan plasma nutfah sangat sulit memenuhi persyaratan ini. Paten juga hanya bisa diberikan pada 'inovasi baru yang dapat digunakan dalam skala industri'. Sementara, uji kebaruan suatu paten hanya didasarkan pada ada tidaknya klaim sebelumnya tanpa melihat tempat penemuan dan pihak-pihak pelestariannya. 'Skala industri' sangatlah jelas merupakan barang mewah yang tidak bisa dipenuhi oleh kebanyakan petani Indonesia yang tunakisma itu.

Berdasarkan itu semua, tidak akan aneh apabila suatu saat di masa depan petani Indonesia akan membayar sangat mahal harga plasma nutfah yang dilestarikannya pada orang lain atau dipenjarakan karena mengabaikan ketentuan itu. Para petani di India telah membayar padi Basmati miliknya, sementara petani Thailand membayar mahal padi Jasmine-nya kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Globalisasi memang, mengutip Giddens, *run away juggernaut which crushes all who resist it*. Globalisasi memang tampaknya bakal menjadi kelanjutan modernisasi yang menengsarakan kebanyakan petani Indonesia itu. Smith⁷ menyimpulkan: *"The net effect of all these factors is paradoxical: increases in agricultural productivity may lead to increases in food insecurity and malnutrition among significant numbers of people under the present form of globalization."*

Permasalahannya, apakah globalisasi hanya membawa dampak yang buruk bagi pertanian, atau secara lebih makro, negara kita? Tidak adakah aspek yang memberikan peluang bagi kehidupan yang lebih baik dan melegakan? Sepanjang pengetahuan penulis, jawabannya ada. Paling tidak ada dua hal yang penulis lihat dapat membawa ke arah yang demikian. Dalam gegap gempita globalisasi produk pertanian yang dipromosikan jaringan kapitalis global, sesungguhnya kita dapat juga mendengar suara lirih yang kian hari terdengar semakin mengeras saja, yaitu suara-suara yang menyerukan agar dunia beralih kepada pertanian berkelanjutan yang tidak membahayakan bagi lingkungan sementara tetap menjaga keamanan pangan hingga tingkat yang baik. Buku yang ditulis Reintjes, Haverkort, dan Waters-Bayer,⁸ misalnya, merekam suara-suara tersebut dari seluruh dunia, menuliskan bagaimana upaya-upaya tersebut diimplementasikan dengan cara yang berbeda-beda namun me-

miliki satu kesepakatan tujuan. Hal lain yang menunjukkan kemungkinan perbaikan berdasarkan globalisasi adalah pengalaman pribadi penulis dalam melakukan penelitian untuk University of Greenwich di tahun 1999 hingga 2000 yang lampau. Pusat Studi Sumberdaya di universitas tersebut mengadakan penelitian serentak di seluruh dunia dengan tema besar *fair trade* yang bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai upaya dan berbagi pengalaman bagaimana perdagangan internasional dapat menjadikan masyarakat lokal menjadi lebih makmur secara berkelanjutan dan bukan hanya menguntungkan negara-negara maju belaka. Sebagai puncak penelitian-penelitian itu, seluruh peneliti yang terlibat berkumpul di Lima, ibukota Peru, untuk berbagi pemikiran dan merencanakan agenda penelitian berikutnya.

Bagaimana menempatkan ini semua ke dalam kotak yang bernama globalisasi? Pembagian sektor menjadi alat bantu utama untuk memahami fenomena ini. Bagian yang telah digambarkan terlebih dahulu, yang berpotensi membawa kesengsaraan untuk bangsa kita, adalah dampak globalisasi di sektor pertama, atau pasar. Sementara bagian berikutnya, peluang untuk keluar dari kesengsaraan, merupakan dampak globalisasi di sektor ketiga. Dampak globalisasi di sektor kedua, tampaknya lebih mudah dirumuskan dengan menyatakan bahwa mau tidak mau, negara harus lebih mengadaptasikan diri dengan sektor pertama yang memang telah terlebih dahulu mengglobal. Sean O' Riain⁹ menuliskan hal sebagai berikut setelah melakukan studi pustaka yang ekstensif: *"There are signs therefore that states are adapting, whether out of necessity or desire, to the changed circumstances in the transition out of embedded liberalism. States themselves have been instrumental in shaping the current globalization project, often in con-*

junction with their own national bourgeois classes."

Dengan demikian, tampaknya sektor ketiga inilah yang menjadi tumpuan harapan bagi 'kaum non-borjuis' yang menghendaki mutu kehidupan yang lebih baik. Melalui tulisan ini, utamanya penulis berkehendak untuk mengemukakan apakah yang disebut sebagai globalisasi di sektor ketiga atau globalisasi masyarakat sipil itu, serta mengemukakan bagaimana prospeknya di masa mendatang. Untuk kepentingan itu, penulis akan mengorganisasikan tulisan ini dengan terlebih dahulu menjelaskan apakah yang disebut dengan globalisasi dan masyarakat sipil, kemudian akan menjelaskan bagaimanakah suatu masyarakat sipil dapat dikatakan telah mengglobal. Bagian berikutnya akan mengemukakan hal-hal apa saja yang mungkin dicapai oleh suatu masyarakat sipil yang mengglobal itu, di samping kemungkinan-kemungkinan kegagalan-kegagalan yang mungkin dihadapi.

GLOBALISASI, MASYARAKAT SIPIL, DAN MASYARAKAT SIPIL GLOBAL

Globalisasi tampaknya merupakan istilah yang semenjak 1990-an dipergunakan secara sangat intensif, namun pengertiannya sendiri tidaklah begitu tegas atau berbeda satu sama lain. Simon Reich mengungkapkan hal ini di halaman awal tulisannya mengenai penggunaan istilah globalisasi:¹⁰

Indeed, Jan Aart Scholte states that "globalization stands out for quite a large public spread across the world as one of the defining terms of late twentieth century social consciousness." The term is often distinguished more by what it is not, rather than what it is. James Rosenau recognizes such a tendency when he states that Globalization is not the same as globalism, which points to aspirations for an end state of af-

fairs wherein values are shared by or pertinent to all the world's five billion people, their environment, their roles as citizens, consumers or producers with an interest in collective action designed to solve common problems. Nor is it universalism—values which embrace all humanity, hypothetically or actually. Another temptation is to indeed specify a definition but one that offers little by way of operational value. Anthony McGrew is hardly the only example of this, nor the most egregious, when he states that globalization constitutes a multiplicity of linkages and interconnections that transcend the nation states (and by implication the societies) which make up the modern world system. It defines a process through which events, decisions and activities in one part of the world can come to have a significant consequence for individuals and communities in quite distant parts of the globe.

Senada dengan Reich, Leslie Sklair¹¹ menulis:

There is no single agreed definition of globalization, indeed, some argue that its significance has been much exaggerated, but as the ever-increasing numbers of books and articles discussing different aspects of it suggest, it appears to be an idea whose time has come in sociology in particular and in the social sciences in general. The author of the first genuine textbook on globalization suggests that it may be 'the concept of the 1990s'.

Sebelumnya, Sklair menuliskan bahwa kemungkinan satu-satunya persetujuan yang ada dalam tulisan-tulisan mengenai globalisasi adalah bahwa fenomena sosial kontemporer tidak lagi dapat diteliti dalam batas-batas negara dengan ketat. Tulisannya:¹²

The central feature of the idea of globalization is that many contemporary problems cannot be adequately studied at the level of nation-states, that is, in terms of each country and its international re-

lations, but instead need to be seen in terms of global processes. Some globalists (for example, Ohmae, 1990) have even gone so far as to predict that global forces, by which they usually mean transnational corporations and other global economic institutions, global culture or globalizing belief systems/ideologies of various types, or a combination of all of these, are becoming so powerful that the continuing existence of the nation-state is in serious doubt. This is not a necessary consequence of most theories of globalization, though many argue that the significance of the nation-state is declining (even if the ideology of nationalism is still strong in some places).

Apabila dilakukan penggolongan, maka literatur mengenai globalisasi dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, menurut Reich,¹³ yaitu: (1) Globalisasi sebagai epik sejarah, yang muncul setelah berakhirnya perang dingin, sehingga globalisasi hanya tampak sebagai periode sejarah saja dan bukannya fenomena sosiologis khusus: "What is clear is that they agree that it can be defined as a period of history rather than, for example, a sociological phenomenon or a theoretical framework. The Cold War was thus a period marked by certain features such as a bipolar distribution of power, the primacy of strategic theories of nuclear deterrence and conventional force compellence in security issues, and a ambiguous tension between isolation and détente in the context of spheres of influence. But it is understood by historians as a discrete period of time with specific characteristics where certain attributes applied and some theories had greater relevance; it is not a theory itself." (2) Globalisasi sebagai seri dari fenomena ekonomi, yang mencakup deregulasi pasar, privatisasi aset, berkurangnya peran negara, difusi teknologi, serta investasi luar negeri langsung: "In its narrowest formulation, the term refers to the worldwide spread of sales, production facilities, and manufacturing processes, all of which reconstitute the international division of labor." (3) Global-

isasi sebagai hegemoni nilai-nilai Amerika atas nilai-nilai lain di seluruh dunia, yang utamanya digembar-gemborkan oleh intelektual seperti Banfield (dalam *The Moral Basis of a Backward Society*) atau David Apter. Serta (4) Globalisasi sebagai revolusi teknologi dan sosial, yang ditandai dengan pergeseran dari kapitalisme industri ke pascaindustri: "*The same economic phenomena identified earlier are important not just because they represent a unique cluster of activity but because they represent a new form of activity. This view depicts a striking revolution among techno-industrial elites, driven mainly by technological advances, that ultimately renders the globe a single market.*"

Empat kategori juga dikemukakan oleh Sklair,¹⁴ namun agak berbeda dengan yang dikemukakan Reich. Sklair menemukan tema-tema sistem dunia, budaya global, masyarakat global, dan kapitalisme global dalam literatur-literatur yang dipelajarinya. Sementara Guillen¹⁵ dengan sangat baik merumuskan lima tema utama perdebatan mengenai globalisasi (*Is it really happening?; Does it produce convergence?; Does it undermine the authority of nation-states?; Is globality different from modernity?; Is a global culture in the making?*) dan menunjukkan bahwa jawaban ya dan tidak telah ditemukan hampir seimbang dalam literatur mengenai globalisasi. Ketiganya telah membuktikan luasnya cakupan pembicaraan dan perselisihan mengenai globalisasi. Untuk kepentingan kepraktisan, penulis ingin mengutipkan definisi globalisasi yang paling populer saja: "*Globalisation can thus be defined as the intensification of world wide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa.*"¹⁶

Istilah masyarakat sipil sebenarnya bisa dilacak sangat jauh hingga ke filsuf Yunani Plato dan muridnya Aristoteles.¹⁷ Masyarakat sipil, dalam pandangan Plato adalah

persyaratan-persyaratan etika yang harus dipenuhi warga negara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sementara Aristoteles menyatakan bahwa masyarakat sipil harus dipisahkan dari satuan politik yang sedang berkuasa. Walaupun menurutnya masyarakat sipil masih ditemukan dalam kelas aristokratik, namun mereka mau bekerja untuk mengartikulasikan kepentingan publik yang lebih luas. Di Roma, Cicero menyatakan bahwa negara harus mau melakukan *distinctive recognition of a legally protected private realm*, yang menandai ide pemisahan yang keras antara negara dengan masyarakat sipil.

Walaupun melekat pada pemikiran klasik, konsep masyarakat sipil kemudian menemukan kekuatannya ketika Adam Ferguson mulai menuliskan pemikirannya.¹⁸ Menurut Ferguson, terdapat syarat-syarat bagi perkembangan moral serta kemajuan ilmu pengetahuan dalam masyarakat, di mana keduanya merupakan penanda kemajuan masyarakat, yaitu pembatasan kekuasaan politik serta pengurangan dampak dari kepentingan swasta. Tanpa pengurangan keduanya, kondisi alamiah untuk perkembangan masyarakat tidak akan tercapai. Ferguson juga menambahkan bahwa pengurangan tersebut hanya dapat dicapai dengan basis sentimen moral yang didasarkan pada *general capacity to put oneself in another's place and see the world through another's eyes*. Hal yang oleh Ferguson disebut sebagai *fellow feeling* tersebut memungkinkan individu-individu untuk berpartisipasi meningkatkan kehidupan orang lain dalam suatu masyarakat sipil yang hubungannya didasarkan pada *shared ethical relations*. Penjelasan Ferguson ini dipandang lebih baik daripada penjelasan Hobbes atau Locke yang mendasarkan masyarakat sipil pada hubungan kontraktual untuk mencapai tujuan bersama yang dijamin secara politis oleh negara. Baik

Hobbes maupun Locke benar-benar telah mengabaikan altruisme, solidaritas dan kebaikan hati sebagai dorongan untuk berbuat dalam masyarakat. Hingga kini, komponen-komponen masyarakat sipil yang dikemukakan oleh Ferguson, yaitu pemisahan dengan negara dan swasta, sifat kesukarelaan dan meringankan beban orang lain tetap diterima sebagai komponen-komponen terpenting dari masyarakat sipil.¹⁹

Dalam berbagai literatur mengenai masyarakat sipil, ditemukan kenyataan bahwa banyak pengarang yang mendefinisikan masyarakat sipil secara negatif, yaitu membuat definisi yang dimulai dengan "masyarakat sipil bukanlah...." Jan Scholte²⁰ mengumpulkan definisi dari jenis ini dan menuliskan kesimpulannya:

For one thing, civil society is not the state: it is non-official, non-governmental. Civil society groups are not formally part of the state apparatus; nor do they seek to gain control of state office. On this criterion political parties should probably be excluded from civil society, although some analysts do include party organisations (as distinct from individual party members who might occupy governmental positions). Other fuzzy cases arise in respect of non-official actors that are organised and/or funded by the state. At what point do such bodies cease to be 'non-governmental'? In addition, some agencies outside government help states and multilateral institutions to formulate, implement, monitor and enforce policies. To what extent can 'civil society' be involved in official regulatory functions? Clearly, the precise boundaries of 'non-governmental' activity are a matter for debate. Nevertheless, it is generally agreed that civil society lies outside the 'public sector' of official governance. Second, civil society is not the market: it is a non-commercial realm. Civil society bodies are not companies or parts of firms; nor do they seek to make profits. Thus the mass media, the leisure industry and cooperatives would, as business enterprises,

not normally be considered part of civil society. To be sure, the distinction between the market and civil society is in practice sometimes far from absolute. For example, companies often organise and fund non-profit bodies, including foundations like Packard and Sasakawa that bear a corporate name. Meanwhile business lobbies like chambers of commerce and bankers' associations promote market interests even though these organisations themselves do not produce and exchange for profit. Many voluntary groups engage a salaried workforce in commercial activities like catalogue sales in order to fund their charitable operations. The environmentalist lobby Greenpeace has considered licensing its name as a brand. At what point does the market presence become so strong that an activity ceases to qualify as 'civil society'? No doubt there are borderline cases, but it is generally agreed that civil society lies outside the 'private sector' of the market economy.

Dari kutipan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa mendefinisikan masyarakat sipil secara negatif akan membawa kepada ketidakjelasan konsep itu, karena perbedaan antara masyarakat sipil dan pemerintahan serta pasar kerap kali tidak jelas. Karenanya, mendefinisikan dengan cara positif akan penulis kemukakan sebagai berikut. Istilah masyarakat sipil adalah: "collective noun, while 'civic' groups, organisations, etc. are the individual elements within civil society."²¹ Secara organisasional, masyarakat sipil mencakup kelompok-kelompok yang formal maupun yang tidak formal. Pengakuan bahwa masing-masing kebudayaan memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai apa yang disebut dengan 'organisasi' termasuk ke dalam pengertian organisasional ini.²² Dalam hal tingkatan kapasitas, masyarakat sipil mencakup kelompok-kelompok yang berjuang sekuat tenaga untuk sekadar selamat dari kehancuran hingga kelompok-kelompok yang memiliki sumberdaya berlimpah. Masyarakat sipil mencakupi kelompok-ke-

lompok yang bisa memanfaatkan kedekatan dengan para elit penguasa hingga mereka yang terpisah sama sekali dari kekuasaan. Taktik yang dipergunakan masyarakat sipil juga berbeda-beda dari yang paling radikal hingga yang kompromistik dengan lembaga-lembaga pemerintahan serta aktor-aktor pasar. Kelompok masyarakat sipil ada yang mengarahkan taktik kepada 'hati' sementara yang lain mengarahkannya kepada 'otak'. Kelompok-kelompok masyarakat sipil dapat juga dibedakan antara yang mempertahankan norma yang ada dalam masyarakat hingga mereka yang berkehendak mengubahnya.

Lalu, kapankah suatu masyarakat sipil dapat dikatakan sudah mengglobal? Jan Scholte²³ mengajukan empat prasyarat untuk menyatakan bahwa suatu masyarakat sipil telah dapat dinyatakan sebagai masyarakat sipil global. Prasyaratnya adalah:

"Global civil society exists in one sense when civic associations concern themselves with issues that transcend territorial geography." Pengertian *'transcend territorial geography'* di sini dapat dipadankan dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Sklair yang sudah dikutipkan terdahulu, yaitu keluar dari batas-batas negara. Masyarakat sipil yang mengglobal berarti tidak hanya memiliki kepedulian mengenai masalah-masalah yang terjadi di negaranya saja, namun juga mencakupi permasalahan orang-orang di negara lain. Gerakan lingkungan internasional²⁴ merupakan contoh yang sangat baik untuk pengertian ini. Berbagai permasalahan lingkungan di Indonesia tidak hanya ditangani oleh masyarakat sipil Indonesia, melainkan juga oleh masyarakat sipil internasional yang bahkan kerap kali tidak memiliki hubungan dengan permasalahan yang timbul di Indonesia. Di samping itu, upaya-upaya yang mengarah kepada *fair trade*, seperti dalam penga-

laman pribadi penulis, menunjukkan bahwa aktivisnya kerap berasal dari negara yang sebetulnya diuntungkan oleh struktur pasar global yang timpang.

"A second way that civic associations can be global lies in their use of supraterritorial modes of communication." Perjalanan udara, telekomunikasi, jaringan komputer, dan media elektronik memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat sipil global untuk mengumpulkan maupun menyebarkan informasi yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan, di lokasi manapun di seluruh dunia. Sejak tahun 1986 wakil-wakil masyarakat sipil telah menjadi bagian dari pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh badan-badan multilateral seperti Bank Dunia dan IMF, baik melalui kehadiran fisik maupun kecepatan informasi yang diperoleh serta kemungkinan memberikan tanggapan atas isi pertemuan tahunan itu. Penggunaan jaringan internet juga menandai globalisasi masyarakat sipil.²⁵

"Civil society is global in a third sense when campaigns adopt a transborder organisation." Menurut Union of International Associations, pada tahun 1998 saja telah terdapat 16,500 organisasi masyarakat sipil yang memiliki anggota aktif yang tersebar di berbagai negara.²⁶ Bentuknya dapat dibedakan menjadi dua jenis besar, yaitu yang memiliki sekretariat atau markas besar di suatu negara tertentu dengan yang tidak memiliki sekretariat. Bentuk tanpa sekretariat berarti mengakui derajat yang sama dalam struktur organisasi yang berupa jaringan.

"...civil society can be global insofar as voluntary associations are motivated by sentiments of transworld solidarity." Banyak masyarakat sipil global yang mendefinisikan identitasnya berdasarkan hal-hal yang melampaui batas teritorial, seperti umur, kelas,

jender, profesi, ras, agama, atau orientasi seksual. Bahkan, ada yang memiliki inspirasi kosmopolitan dengan mencantumkan visi organisasi untuk menyediakan jaminan keamanan, persamaan dan demokrasi di seluruh tempat di bumi.²⁷

PROSPEK DAN ANCAMAN KEGAGALAN BAGI MASYARAKAT SIPIL GLOBAL

Walaupun berbagai contoh yang dikemukakan untuk melengkapi definisi masyarakat sipil global tampaknya sangat positif, penulis harus mengingatkan kembali bahwa secara inheren sesungguhnya masyarakat sipil tidaklah bisa dinyatakan sebagai entitas yang baik atau jahat. Seperti yang dinyatakan oleh Scholte:²⁸ *"In a word, is the growth of supraterritorial civic activity a positive or a negative thing? As one might expect, this straightforward question does not yield a straightforward answer. In whatever domain—global, regional, national or local—civil society is not inherently good or evil."* Berbagai literatur menyatakan bahwa sektor ketiga ini merupakan arena yang dapat melawan dominasi pemerintah atau eksploitasi pasar, namun yang lain juga menyatakan bahwa masyarakat sipil sesungguhnya dapat saja sangat hierarkis dan opresif seperti pemerintah, atau eksploitatif terhadap kelompok orang tertentu, seperti halnya pasar. Pertanyaannya adalah dalam cara bagaimana masyarakat sipil global dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, terutama rekan-rekannya yang kurang beruntung di dunia ketiga? Di bawah ini, penulis akan mengemukakan sejumlah kemungkinan jawaban.

Pertama, masyarakat sipil global dapat berperan dalam mengamankan kesejahteraan material. Ralph Kramer²⁹ mencatat bahwa memang terdapat bukti yang cukup kuat untuk menyatakan lebih efisiennya

mekanisme yang dipergunakan masyarakat sipil dibandingkan dengan mekanisme pasar atau yang dipergunakan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh masyarakat sipil secara mandiri mampu menjangkau peningkatan pendidikan, kesehatan, dan perumahan di berbagai negara. Berbagai program ekonomi juga banyak yang sangat berhasil dan mampu menjadi kontributor signifikan bagi pendapatan masyarakat. Contoh terbaik untuk hal ini adalah pendirian Grameen Bank di Pakistan atau program-program pembiayaan usaha kecil yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan lainnya.³⁰

Kedua, masyarakat sipil global dapat menjadi mitra masyarakat luas dalam hal pendidikan kewargaan atau *civic education*. Secara khusus, masyarakat sipil global dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat berkenaan dengan berbagai aspek dari globalisasi, membagi pengetahuan mengenai keadaan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terus berubah dengan cepat. Scholte³¹ mencatat berbagai hal yang dapat dipergunakan dalam pendidikan kewargaan sebagai berikut: *"Civic groups can in this vein prepare handbooks and information kits, produce audio-visual presentations, organize workshops, circulate newsletters, supply information to the mass media, maintain listservs and websites on the Internet, and develop curricular materials for schools and universities. It is in good part thanks to supraterritorial civil society that the world public has become more (albeit perhaps still not adequately) aware of global issues. As people gain greater cognisance of the new geography and its effects, the chances that globalisation undermines human security and social justice can be reduced."*

Ketiga, masyarakat sipil global dapat juga memberikan kontribusi positifnya dengan memberikan suara bagi kepentingan-kepentingan yang dianggapnya membutuh-

kan dukungan internasional. Dalam beberapa kesempatan, penulis mendapatkan e-mail yang berisikan pernyataan yang diharapkan ditandatangani oleh sebanyak mungkin orang untuk memberikan tekanan bagi pihak tertentu. Ketika Amerika Serikat mulai menyerang Afghanistan, bahkan beberapa hari sebelumnya, telah muncul sebuah e-mail berantai yang berjudul "War is Not the Answer" yang mengharapkan tidak adanya serangan 'balasan' Amerika Serikat setelah New York mengalami teror. Manuel Castells³² mencatat bahwa para aktivis lingkungan terbiasa memberikan kamera video dan mengajari penduduk lokal bagaimana menggunakannya untuk merekam aktivitas pembalakan hutan, dan kemudian memutar film yang dibuat penduduk dalam forum-forum internasional. Dalam kata-kata Scholte:³³ *"In particular, global civil society can hand the microphone to circles like indigenous peoples, smallholder farmers, the urban poor, and women who tend to get a limited hearing through firms and official agencies. In this way transborder civic activity can be a significant force for equity and democracy."*

Keempat, masyarakat sipil global dapat memancing perdebatan mengenai hal yang dianggap penting, yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Dalam definisi partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein,³⁴ terkandung makna bahwa masyarakat sipil haruslah mengajukan perspektifnya sendiri terhadap suatu masalah. Masyarakat sipil global dapat mendorong proses ini dengan mempertanyakan keberlakuan teori ekonomi ortodoks, mengajukan berbagai permasalahan lingkungan dan mengajukan cara-cara penilaian dan pengurangan kemiskinan alternatif. Dalam demokrasi yang sehat, suara-suara seperti itu kerap kali melahirkan kebijakan-kebijakan yang lebih efisien dan efektif.

Kelima, masyarakat sipil global dapat mempengaruhi kebijakan negara-negara dengan cara mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, termasuk yang berkenaan dengan kebijakan perdagangan internasional. Banyak sekali kebijakan pemerintah dan pasar global yang tidak transparan. Dalam contoh yang diberikan di awal, kebijakan-kebijakan yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan WTO sesungguhnya masih diselubungi dengan berbagai hal yang membuat masyarakat pertanian Indonesia tidak dapat mengetahui secara persis konsekuensi masuknya Indonesia ke dalam WTO, dan bagaimana itu semua mempengaruhi nasib mereka. Kalau masyarakat sipil global dapat memberikan informasi itu, maka pihak-pihak yang berpotensi dirugikan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih didasarkan pada informasi akurat.

Keenam, masyarakat sipil global dapat bekerjasama untuk memberikan legitimasi atau menolak memberikannya atas dasar praktik-praktik pemerintahan dan pasar di suatu tempat tertentu. Penolakan bantuan dari suatu pemerintahan yang dianggap tidak demokratis merupakan suatu cara. Dalam perdagangan kayu, sebagai misal, masyarakat sipil global dapat mempengaruhi pasar dengan menolak pembelian kayu yang tidak dihasilkan dari produk yang berasal dari hutan yang lestari melalui mekanisme sertifikasi ekolabel.³⁵

Ketujuh, masyarakat sipil global, sebagai hasil upayanya dalam hal promosi kesejahteraan material, pendidikan kewargaan, diskusi publik, serta promosi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat membantu menciptakan kesetaraan dalam masyarakat. Kesetaraan tersebut merupakan bekal yang sangat kuat untuk mencapai integrasi sosial.

Sampai di sini, penulis hendak menantang kesimpulan Putnam bahwa modal sosial hanya dapat dikembangkan dengan 'day-to-day' serta 'face-to-face civic engagement'.³⁶ Sangatlah jelas, bahwa walaupun jarak memisahkan aktivisnya dengan tempat asal masalah, sesungguhnya modal sosial dapat terbangun dengan baik. Hal ini juga di-suarakan oleh Jacky Smith ketika membicarakan masyarakat sipil global.³⁷

The examination above suggests that even without face-to-face contact, transnational social movements can generate social capital that is crucial to democratizing the global political process. Moreover, it suggests that transnational political associations are one of the more important civil society actors in the global polity. Their work to target international decision-making processes and to mobilize local and national groups around global policy issues provides the only democratic oversight and participation in international politics. Thus, they are the main forces working to provide democratic accountability within an evolving global governing framework.

Apa sajakah yang dapat menjadi ancaman bagi potensi yang begitu besar? Pertama, bahwa masyarakat sipil dengan modal sosial dan intelektualnya saja tidak pernah cukup. Kebutuhan terhadap modal material atau sumberdaya tetap diperlukan, dan ini tidak selamanya tersedia. Sangatlah tidak masuk akal untuk menyatakan bahwa daerah yang minus sumberdaya material, utamanya sumberdaya alam, dapat memacu kesejahteraannya dengan cepat dengan bermodalkan modal sosial dan intelektual belaka. Penulis hendak menyatakan bahwa ada batas minimum bagi masing-masing jenis modal agar suatu masyarakat dapat secara mandiri mengejar tingkat kesejahteraan tertentu. Dalam hal ini, penulis hendak menyatakan bahwa pemerintahlah yang mungkin mengalokasikan sumberdaya tersebut. Masyarakat sipil global, dalam hal ini, dapat memberikan tekanan un-

tuk mewujudkan suatu pembangunan yang merata. Kedua, seperti yang disampaikan di depan, bahwa sesungguhnya masyarakat sipil bisa saja merupakan masyarakat sipil yang jahat, sehingga dalam mengejar kesejahteraannya bisa saja mengorbankan kepentingan anggota masyarakat sipil lainnya, dan kelompok-kelompok seperti ini juga mengalami globalisasi.³⁸ Seperti kata Scholte: "In short, it must never be forgotten that civil society is not intrinsically virtuous." Ketiga, seperti halnya program-program pemerintah maupun pasar, kebijakan yang buruk atau salah juga kerap ditemui. Gerakan-gerakan HAM misalnya kerap kali berantakan karena buta terhadap kebudayaan tertentu. Benturan keras yang terjadi dengan masyarakat lokal malahan membuat masyarakat sipil global menjadi tidak dapat bekerja lagi. Gabelman dan Gelman menyarikan apa saja jenis kegagalan dan bahaya yang diderita oleh masyarakat sipil ini.³⁹ Ancaman kegagalan yang sejenis, keempat, juga datang dari pemaksaan atau fundamentalisme demokrasi. Seperti banyak hal dalam globalisasi, demokrasi juga mengalami proses fundamentalisme, yaitu penegasian keberlakuan sistem yang lain, sehingga malahan promosi demokrasi diterapkan dengan cara yang bertentangan dengan kebebasan yang digembar-gemborkan oleh demokrasi itu sendiri. Scholte⁴⁰ mencatat: "For reasons noted earlier, global civil society is often championed as a force for democracy: it can give voice, stimulate debate, confer legitimacy, etc. Yet civic groups – even those that actively campaign for a democratisation of official institutions and market operations – can fail to meet democratic criteria in their own internal workings." Masih berkenaan dengan praktik demokrasi, terakhir, kegagalan lain yang mungkin muncul adalah tidak terpenuhinya representasi. Sangat boleh jadi, kegagalan inilah yang paling sering muncul dalam praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat si-

pil internasional. Telah banyak kasus di mana suatu masyarakat sipil mendapatkan bantuan atau dukungan terus menerus, sementara kelompok lain terabaikan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh preferensi kelompok-kelompok masyarakat sipil global serta kelemahan jaringan antarmereka. Kalau saja ancaman-ancaman kegagalan itu dapat diatasi, maka masyarakat sipil global sungguh dapat menjadi kekuatan pengimbang bagi pasar maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, M. *The Global Age*. Cambridge: Polity Press, 1996.
- American Behavioral Scientist*, Volume 42 No. 1, 1998.
- Annual Review of Sociology*, Volume 26, 2000.
- Annual Review of Sociology*, Volume 27, 2001.
- Castells, M. *The Information Age, Economy, Society and Culture. Volume II: The Power of Identity*. Massachussetts: Blackwell Publishers Inc., 1997.
- CSGR Working Paper No. 31/99. Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR), University of Warwick, Coventry, 1999.
- Daly, H. dan Cobb, J.B.. *For the Common Good: Redirecting the Economy toward Community, the Environment and Sustainable Future*. Boston: Beacon Press, 1989.
- de Castro Fonseca, C. P. *Agriculture, Food, the State and the Multinationals: the Soybean in United Kingdom and the World Food System*, ISS Research Paper, The Hague, 1999.
- Ehrenberg, J. *Civil Society: The Critical History of an Idea*. New York dan London: New York University Press, 1999.
- Giddens, A. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press, 1991.
- Global Governance*, Volume 5, 1999.
- Hall, Stuart, David Held, dan Anthony McGrew. *Modernity and Its Futures*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Hann, C. dan E. Dunn (eds.). *Civil Society: Challenging Western Models*. London: Routledge, 1996.
- Harasim, L. (ed.). *Global Networks: Computers and International Communication*. Cambridge: MIT Press, 1993.
- Harcourt, W. (ed.). *Women @ Internet: Creating New Cultures in Cyberspace*. London: Zed Books, 1999.
- Higman, S., et al. *The Sustainable Forestry Handbook*. London: Earthscan Publications, Ltd., 1999.
- <http://csf.colorado.edu/jwsr>.
- Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 11, 1999.
- Journal of Democracy*, 6(1), 65-78, 1995.
- Journal of the American Planning Association*, Vol. 35 No. 4, 1969.
- Lee, E. *The Labour Movement and the Internet: The New Internationalism*. London: Pluto, 1996.
- McCormick. *Reclaiming Paradise: The Global Environmental Movement*. Bloomington: Indiana University Press, 1989.

Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. Vol. 29/3 September 2000.

Princen, T. dan M. Finger (eds.). *Environmental NGOs in World Politics: Linking the Global and the Local*. London: Routledge, 1994.

Reich, S. What is Globalization? Four Possible Answers. *Working Paper* No. 261. The Hellen Kellog Institute for International Studies. University of Notre Dame, 1998.

Reintjes, C., B. Haverkort dan A. Waters-Bayer. *Pertanian Masa Depan, Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999.

Robertson, Roland. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. New York: Sage Publications, 1992.

Rosenau, J. "The Dynamics of Globalisation: Towards an Operational Formulation." *Paper* dipresentasikan pada The International Studies Association Convention, San Diego, 18 April 1996.

S. Johnson, S. and Rogaly, B. *Microfinance and Poverty Reduction*. Oxford: Oxfam/ACTIONAID, 1997.

Scholte, J.A.. "Globalisation and Modernity." *Paper* dipresentasikan pada The International Studies Association Convention. San Diego, 15-20 April 1995.

Seligman, A. B.. *The Idea of Civil Society*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992.

Union of International Associations. *Yearbook of International Organizations* 1998/99, Vol. I. Munich: Saur, 1998.

Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 11, No. 1, 2000.

Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 12, No. 1, 2001.

Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Nomor IV Tahun 1999.

Wapner, P. *Environmental Activism and World Civic Politics*. New York: State University of New York Press, 1996.

Waterman, P. *Globalization, Social Movements and the New Internationalisms*. London: Mansell, 1998.

Waters, M. *Globalization*. Routledge. London, 1995.

CATATAN BELAKANG

¹ Wahono, F. Revolusi Hijau: Dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi. Termuat dalam *Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif* Nomor IV Tahun 1999.

² *Ibid.*

³ H. Daly, dan J. B. Cobb, *For the Common Good: Redirecting the Economy toward Community, the Environment and Sustainable Future*, (Boston: Beacon Press, 1989). Lihat juga Goldsmith, J. *Perangkap*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

⁴ Jhantani, H. dan Hanim, L., "Petani dan Pertanian di Era WTO," dalam *Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif* Nomor IV Tahun 1999.

⁵ *Ibid.*

⁶ Laporan penelitian Catarina Pimenta de Castro Fonseca mengenai kedelai menuliskan bahwa duet Monsanto-Cargill-Continental Grain dan Dupont/Pioneer-Novartis-Archer Daniels Midland (ADM) memiliki 51% paten benih kedelai. Lihat de Castro Fonseca C. P., "Agriculture, Food, the State and the Multinationals: the Soybean in United Kingdom and the World Food System," *ISS Research Paper*, The Hague, 1999.

⁷ T. Smith, "Biotechnology and Global Justice," *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 11, 1999.

⁸ C. Reintjes, B. Haverkort, dan A. Waters-Bayer, *Pertanian Masa Depan, Pengantar untuk Pertanian*

Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999).

⁹ S. O' Riain, "States and Market in an Era of Globalization," *Annual Review of Sociology*, Volume 26, 2000.

¹⁰ S. Reich, "What is Globalization? Four Possible Answers," *Working Paper*, Number 261, The Hellen Kellogg Institute for International Studies, University of Notre Dame, 1998. Lihat juga J. A. Scholte, "Globalisation and Modernity," *Paper* dipresentasikan pada International Studies Association Convention, San Diego, 15-20 April 1995; J. Rosenau, "The Dynamics of Globalisation: Towards an Operational Formulation," San Diego, *Paper* dipresentasikan pada International Studies Association Convention, San Diego, 18 April 1996; serta A. McGrew, "A Global Society," dalam Stuart Hall, David Held, dan Anthony McGrew, *Modernity and Its Futures*, (Cambridge: Polity Press, 1990).

¹¹ L. Sklair, "Competing Conceptions of Globalization," *Journal of World-Systems Research*, Volume 2, 1999, dalam <http://csf.colorado.edu/jwsr>. Hal-hal senada diungkapkan oleh setidaknya empat pengarang terbesar dalam studi globalisasi. Silakan periksa M. Waters, *Globalization*, (London: Routledge, 1995); Roland Robertson, *Globalization: Social Theory and Global Culture*, (New York, Sage Publications, 1992); A. Giddens, *The Consequences of Modernity*, (Cambridge: Polity Press, 1991); serta M. Albrow, *The Global Age*, Cambridge: Polity Press, 1996.

¹² *Ibid.*

¹³ S. Reich, *Op.Cit.*

¹⁴ L. Sklair, *Op.Cit.*

¹⁵ M. F. Guillen, "Is globalization Civilizing, Destructive or Feeble? A Critique of Five Key Debates in Social Science Literature," dalam *Annual Review of Sociology*, No. 27, 2001.

¹⁶ A. Giddens, *Op.Cit.*

¹⁷ J. Ehrenberg, *Civil Society: The Critical History of an Idea*, (New York and London: New York University Press, 1999).

¹⁸ A. B. Seligman, *The Idea of Civil Society*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1992).

¹⁹ Banyak pula yang berpendirian bahwa pemerintah dan swasta merupakan bagian dari masyarakat sipil, namun pandangan ini tidak populer dalam bacaan-bacaan ilmu sosial. Suatu pandangan yang lebih lunak menyebutkan bahwa pemerintah dan swasta merupakan partner dari masyarakat sipil yang keberadaannya terlalu masih terlalu diremehkan. Pandangan seperti ini misalnya dikemukakan oleh Brian O'Connell yang menuliskan "Civil Society: Definitions and Descriptions," termuat dalam jurnal *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, Vol. 29/3 September 2000. Tentu saja, analisis yang berpendirian strukturalis Marxian berpendirian lebih keras mengenai pemisahan ini.

²⁰ J. A. Scholte, "Global Civil Society: Changing the World?" *CSGR Working Paper*, No. 31/99. Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR), University of Warwick, Coventry.

²¹ Scholte, *Op.Cit.*

²² Untuk isu ini, silakan periksa C. Hann dan E. Dunn (eds.), *Civil Society: Challenging Western Models*, (London: Routledge, 1996).

²³ Scholte, *Op.Cit.*

²⁴ Untuk masalah ini, silakan periksa McCormick, *Reclaiming Paradise: The Global Environmental Movement*, (Bloomington: Indiana University Press, 1989); T. Princen dan M. Finger (eds.), *Environmental NGOs in World Politics: Linking the Global and the Local*, (London: Routledge, 1994); serta P. Wapner, *Environmental Activism and World Civic Politics*, (New York: State University of New York Press, 1996).

²⁵ Penggunaan internet dalam mendukung gerakan masyarakat sipil global misalnya dapat dibaca pada H. Frederick, "Computer Networks and the Emergence of Global Civil Society," dalam L. Harasim (ed.), *Global Networks: Computers and International Communication*, (Cambridge: MIT Press, 1993); E. Lee, *The Labour Movement and the Internet: The New Internationalism*, (London: Pluto, 1996); serta W. Harcourt (ed.), *Women @ Internet: Creating New Cultures in Cyberspace*, (London: Zed Books, 1999).

²⁶ Informasi tersebut dapat diperoleh dari Union of International Associations, *Yearbook of International Organizations 1998/99*, Vol. I, (Munich: Saur, 1998).

²⁷ Untuk beberapa contoh organisasi yang memiliki visi demikian, silakan periksa P. Waterman, *Globalization, Social Movements and the New Internationalisms*, (London: Mansell, 1998).

²⁸ Scholte, *Op. Cit.*

²⁹ R. Kramer, "Third Sector in Third Millennium?" *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Vol. 11, No. 1, 2000.

³⁰ S. Johnson dan B. Rogaly, *Microfinance and Poverty Reduction*, (Oxford: Oxfam/ ACTIONAID, 1997).

³¹ Scholte, *Op. Cit.*

³² M. Castells, *The Information Age, Economy, Society and Culture. Volume II: The Power of Identity*, (Massachusetts: Blackwell Publishers Inc., 1997). Silakan periksa Bab "The Greening of the Self."

³³ Scholte, *Op. Cit.*

³⁴ S. Arnstein, "Eight Rungs in the Ladder of Citizen Participation," dalam *Journal of the American Planning Association*, Vol. 35 No. 4, 1969.

³⁵ Mengenai mekanisme ini, dapat dibaca pada S. Higman, et. al. *The Sustainable Forestry Handbook*, (London: Earthscan Publications, Ltd., 1999).

³⁶ R. Putnam, "Bowling Alone: America's Declining Social Capital," *Journal of Democracy*, 6(1), hlm. 65-78.

³⁷ J. Smith, "Global Civil Society? Transnational Social Movement Organizations and Social Capital," *American Behavioral Scientist*, Volume 42, No. 1, 1998.

³⁸ J. Mittelman dan R. Johnston, "The Globalization of Organized Crime, the Courtesan State, and the Corruption of Civil Society," dalam *Global Governance*, Volume 5.

³⁹ M. Gibelman, dan S. R. Gelman, "Very Public Scandals: Nongovernmental Organizations in Trouble," dalam *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, Vol. 12, No. 1, 2001.

⁴⁰ Scholte, *Op. Cit.*

